



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jl. Palatehan I No. 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, Telp. 021- 27510964 Fax. 021-7220050

Siaran Pers

Potensi Pengembangan SiKasep ke Berbagai Sektor Perumahan

Jakarta, 2 Oktober 2020

Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) menjadi platform bagi masyarakat dalam mencari rumah bersubsidi bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Aplikasi yang dibesut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ini diluncurkan pada akhir tahun 2019 dan telah resmi digunakan sejak awal tahun 2020.

Tercatat dalam database *Management Control* PPDPP, per tanggal 2 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB, jumlah masyarakat yang mendaftar SiKasep telah mencapai 232.992 pengguna, yang diantaranya 96.081 lolos subsidi checking dan 9.331 dalam proses verifikasi oleh bank pelaksana, dan 94.006 masyarakat telah memperoleh bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan, per 2 Oktober 2020 realisasi penyaluran FLPP tahun 2020 telah mencapai Rp9,6 Triliun yang didistribusikan untuk 94.006 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), atau telah mencapai 91,71% dari target penyaluran yang ditetapkan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp11 Triliun. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 2 Oktober 2020 telah mencapai Rp53,96 Triliun untuk 749.608 unit rumah.

Tingginya animo masyarakat dalam menggunakan aplikasi SiKasep tersebut menunjukkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) tidak menghambat pemerintah untuk menunaikan tugasnya dalam menjalankan program penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.

Untuk terus mengakomodir kebutuhan masyarakat, pemerintah pada tahun 2021 terus melanjutkan program tersebut dengan menetapkan alokasi anggaran FLPP yang disalurkan oleh PPDPP sebesar Rp16,62 Triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dan Rp2,5 Triliun dari dana bergulir, sehingga total alokasi anggaran Rp19,1 Triliun untuk 157.500 unit rumah. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan bantuan pembiayaan perumahan yang disediakan untuk tahun 2021 adalah berupa FLPP dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Meskipun SiKasep merupakan aplikasi sederhana yang diunduh secara gratis melalui platform Google Playstore, rangkaian sistem yang dibangun pemerintah dalam aplikasi tersebut cukup kompleks dan memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan dalam menjembatani ketersediaan hunian (*supply*) terhadap kebutuhan hunian (*demand*) dari masyarakat.

Rangkaian sistem yang dikatakan Big Data Hunian tersebut telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti: Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan verifikasi kependudukan; Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara untuk memastikan keamanan transaksi data dengan pihak perbankan; Bank Pelaksana dan Developer Perumahan selaku mitra kerja pemerintah dalam rangkaian proses bisnis penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan; hingga penerapan Sistem Tol Data Indonesia guna sinergisitas data dengan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan.

Di tahun 2020 ini, jumlah bank pelaksana yang bekerjasama dengan pemerintah dalam menyalurkan FLPP adalah sebanyak 42 Bank yang terdiri dari Bank Umum Nasional dan Bank Pemerintah Daerah, baik Nasional maupun Konvensional. Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), pemerintah juga mencatat saat ini per tanggal 2 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB sebanyak 20 asosiasi dan Perumahan Nasional telah mendaftarkan data perumahannya dengan jumlah mencapai 11.692 lokasi terdaftar.

PPDPP sendiri saat ini telah mensinergikan data bantuan pembiayaan perumahan lainnya seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) ke dalam *Management Control* PPDPP, hal tersebut untuk memastikan bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah merupakan data terpadu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Arief Sabaruddin juga menyampaikan bahwa di penghujung tahun 2020 ini pemerintah akan segera merilis sistem terbarunya, yaitu Sistem Pemantauan Infrastruktur (SiPetruk). Sistem tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas rumah yang dibangun oleh para pengembang perumahan yang terdaftar dalam SiKumbang sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah. “Kita tidak hanya sekedar menyalurkan saja, tapi harus memastikan bahwa rumah yang dibangun adalah layak dan terjamin kualitasnya” ujar Arief, demikian Arief Sabaruddin biasa disapa.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Humas PPDPP
Jl. Palatehan I No. 27, Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 021 – 27510964.
Website: www.ppdpp.id.
Hotline : 0 – 800 – 10 - 77377 (bebas pulsa)
Email : hotline.ppdpp@gmail.com

